

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan industri yang prospektif dan kompetitif. Keadaan ini ditandai oleh perkembangannya yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir. Menurut catatan *World Tourism Organization (WTO)*, pada tahun 2005 tercatat 700 juta orang melakukan perjalanan wisata internasional, dan pada tahun 2007 tercatat lebih dari 850 juta. Berdasarkan angka tersebut lebih dari 25% tersebar di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Dalam pertumbuhan yang pesat tersebut, di Asia Tenggara, Indonesia masih jauh tertinggal dari Thailand, Singapura, dan Malaysia dalam merebut kunjungan wisata internasional. Apabila tidak berbenah, bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam persaingan global yang semakin ketat.

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi perhatian para penentu kebijakan sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk menjadi sektor

devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Visi kepariwisataan Indonesia adalah menumbuhkembangkan kesejahteraan dan perdamaian. Oleh karena itu pembangunan pariwisata harus mampu memberi manfaat secara adil bagi semua lapisan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata sesuai dengan peran yang dilakukannya.¹

Pada prinsipnya pembangunan pariwisata dituntut mengaplikasikan tiga paradigma utama, yaitu:

1. *Economically Viable*, harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. *Socially Acceptable*, harus mampu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan serta memperkuat jatidiri, kemandirian bangsa, memperkaya kepribadian, mempertahankan nilai-nilai agama, serta berfungsi sebagai media menciptakan ketertiban dunia.
3. *Environmentally sustainable*, harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.²

Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menjadi kunci yang harus dipegang oleh para penentu dan pelaksana kebijakan pembangunan pariwisata. Sebagai

¹ E-mail: Beberapa_Membangun_Pariwisata_Berbasis_Masyarakat_Siapari_Semarang_2008_hlm_1

komponen utama dalam *community based tourism* (CBT), masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Peran serta mereka dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka.³

Masyarakat atau penduduk lokal dapat menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata lokal. Konsep CBT dapat diterapkan dalam penyelenggaraan wisata petualangan, wisata budaya, dan wisata ekologi, sehingga model CBT sangat cocok untuk pelestarian sumber-sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budaya.

Selain hal tersebut, sektor pariwisata memang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan daerah miskin atau daerah terpencil. Masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat menjadi pemandu, penyedia jasa transportasi, seperti sampan, perahu motor atau sepeda. Masyarakat juga dapat menyediakan rumahnya untuk *home stay*, tentu saja sedikit dipoles agar lebih bersih dan artistik, walau sederhana.

Peningkatan wisata petualangan, ekologi dan budaya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitarnya. Selain itu CBT dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan,

³ Susanti, *Perencanaan Pariwisata: Suatu Pendekatan*, Yogyakarta, 2004

dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan, sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata.

Pada dasarnya pariwisata berbasis masyarakat adalah konsep ekonomi kerakyatan di sektor riil yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya pun langsung dinikmati oleh mereka. Perlu mendapatkan perhatian khusus dalam konsep CBT adalah wisatawan lokal. Hal ini dapat dimulai dengan kegiatan kenali negerimu dan cintai negerimu. Wisatawan lokal ini perannya sangat besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang nantinya diharapkan akan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Mereka dapat menjadi inspirator dan sekaligus mempromosikan kepada orang lain. Obyek-obyek wisata yang sering dan padat dikunjungi oleh wisatawan nusantara akan memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan dengan yang jarang dikunjungi wisatawan nusantara. Semakin banyak wisatawan nusantara berkunjung, semakin terkenal obyek tersebut dan pada akhirnya merupakan promosi untuk menarik datangnya wisatawan mancanegara.

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata atas dasar CBT ini merupakan salah satu tugas pemerintah daerah, meskipun tetap dipaparkan

agar hanya sampai sebatas sebagai fasilitator untuk menarik investor swasta melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Event-event pariwisata harus disusun secara konsisten, sehingga dapat dijadikan acuan para pelaku pariwisata menjual ke berbagai pasar pariwisata dunia. Tanpa event yang tetap dan berkualitas, maka akan sulit menarik pengunjung ke lokasi tersebut. Selain itu prasarana pariwisataapun harus ditingkatkan kualitasnya terutama yang terkait dengan kesehatan, kebersihan, keamanan dan kenyamanan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi obyek wisata budaya dan wisata alam, sudah seharusnya secara maksimal berusaha mengembangkan potensi obyek wisata yang ada di daerahnya agar dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan pendapatan masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali obyek wisata yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi penduduk lokal, seperti desa wisata di daerah Sleman dan Bantul, wisata petualangan di daerah Gunung Kidul, wisata budaya di Kota Yogyakarta, atau wisata alam di Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum tata administrasi negara pada khususnya